LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TRIWULAN I TAHUN 2026

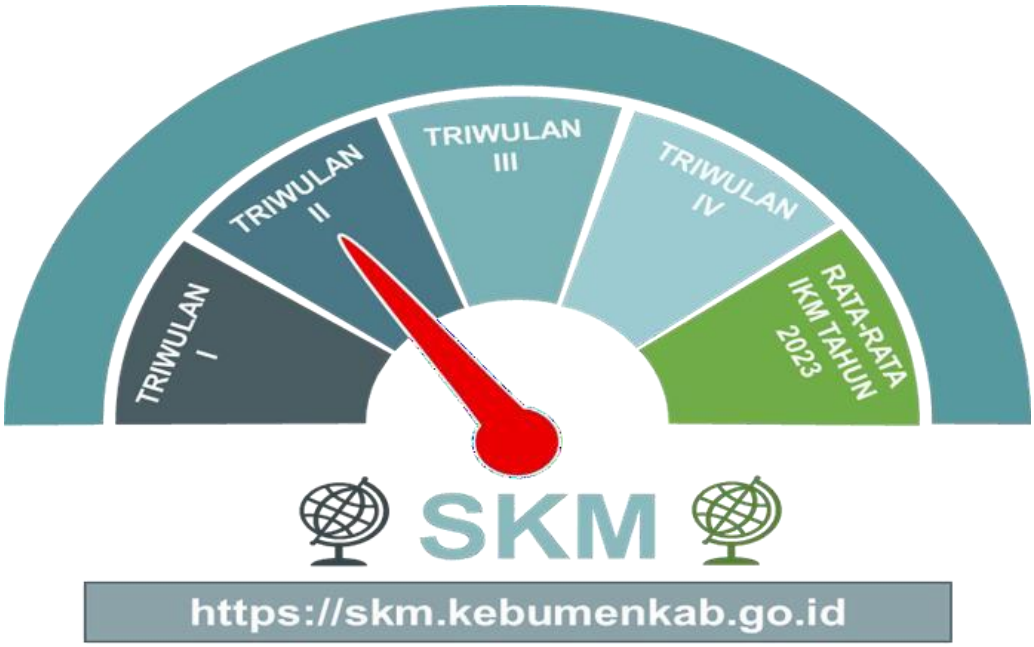

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 1
DAFTAR ISI 1
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Manfaat 1
1.3 Metode Pengumpulan Data 2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM 3
1.5 Penentuan Jumlah Responden 3
BAB II 4
ANALISIS DATA SKM 4
2.1 Analisis Responden 4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan 6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 8
2.4 Tren Nilai SKM 9
BAB III 10
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 10
BAB IV 14
KESIMPULAN 14
LAMPIRAN 15
1. Kuesioner
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan

publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yaitu :

1. **Persyaratan**: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana**: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana**: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) Triwulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 449 orang dan sampel sebanyak 49 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 49 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	29	0,6%
		Perempuan	20	0,4%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	11	0,22%
		D1/D2/D3	12	0,24%
		D4/S1	15	0,3%
		S2	7	0,14%
		S3	0	0%
		Lainnya	4	0,08%
3	Pekerjaan	ASN/TNI/POLRI	22	0,4%
		Wirausaha/Swasta	6	0,1%
		Ibu Rumah Tangga	0	0%
		Pedagang	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	21	0,4%
4	Usia	<=20	1	0,02%
		20-29	13	0,27%

		30-39	19	0,39%
		40-49	11	0,22%
		>=50	4	0,08%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Nama Layanan	Jumlah Responden	Unsur Pelayanan									IKM Per Jenis Layanan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	2	100	100	100	100	100	100	87,5	100	87,5	96,25
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	87,5	87,5	87,5	100	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	88,69
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	2	100	87,5	87,5	87,5	87,5	100	100	87,5	100	92,13
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	2	87,5	87,5	0	87,5	87,5	0	87,5	87,5	87,5	89,38
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	3	91,67	100	100	100	100	100	100	100	100	98,08
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	13	96,15	94,23	92,31	100	94,23	94,23	88,46	88,46	100	93,29
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	2	100	87,5	87,5	100	100	100	100	100	100	96,25
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	11	88,64	88,64	86,36	97,73	90,91	88,64	90,91	88,64	97,73	90
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99

17	Pelayanan Musyawarah Desa	2	100	75	100	100	100	100	100	75	100	93,5
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
Rata-rata IKM Per Unsur			96,76	93,86	96,08	98,18	96,51	98,02	96,54	94,31	97,35	95,44
IKM Unit Layanan			95,44									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

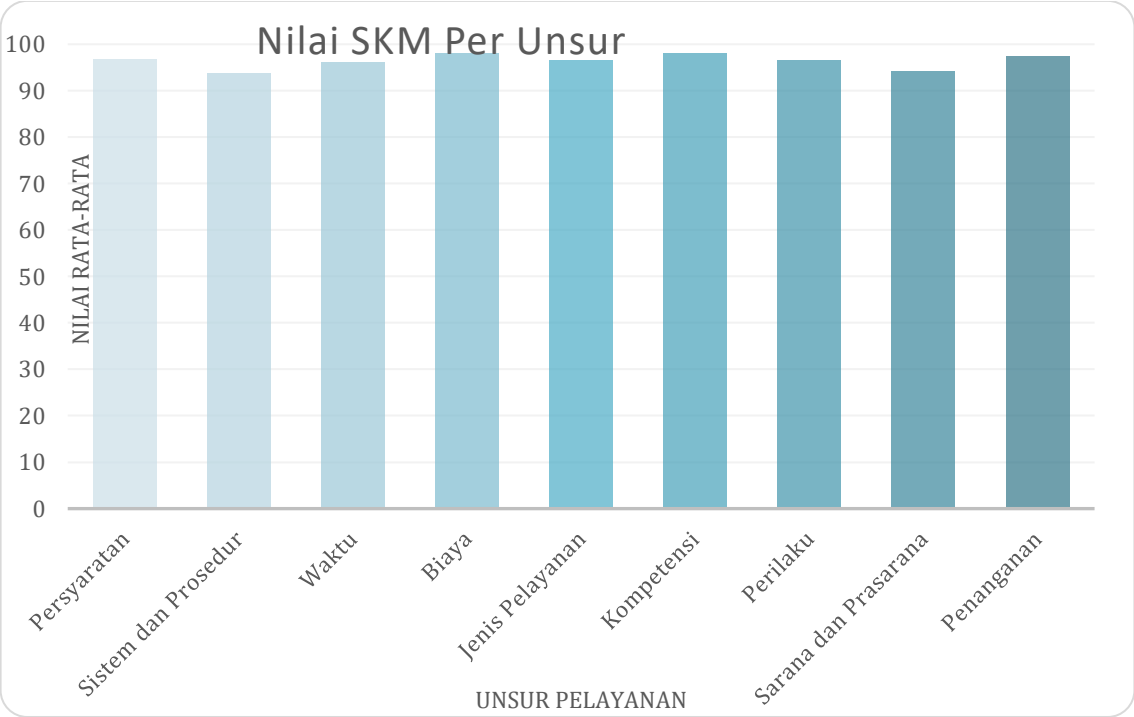

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Sistem, mekanisme, prosedur dan Sarana dan Prasarana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Aspek Sistem, mekanisme, prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 93,86. Selanjutnya aspek Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 94,31 adalah nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah, tidak komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, memperbaiki alur pelayanan, serta meningkatkan sarana dan prasarana agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan,

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sistem, mekanisme, prosedur	Menyelenggarakan rapat internal untuk mereview standar pelayanan	Juli 2026	Sekretariat dan bidang
2	Sarana dan Prasarana	Menyelenggarakan rapat dengan bidang untuk mereview sarana dan prasarana	Juli 2026	Sekretariat dan bidang

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2. Tren Nilai SKM 2023-2026

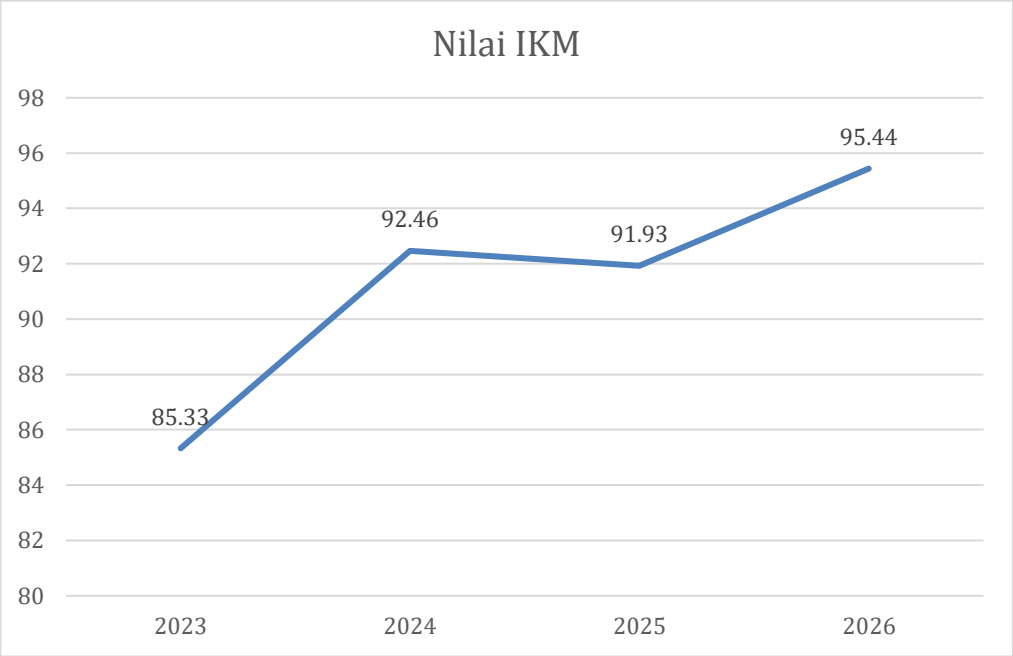

Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen periode/triwulan (IV) tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode/Triwulan IV Tahun 2025

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	**95,83**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**95,83**
3	Waktu Penyelesaian	**95,83**
4	Biaya/Tarif	**95,83**
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	**95,83**
6	Kompetensi Pelaksana	**95,83**
7	Perilaku Pelaksana	**95,83**
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	**95,83**
9	Sarana dan Prasarana	**100**

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode/triwulan IV. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/ hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	
	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	
	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	-	Tidak ada kegiatan ini di triwulan IV tahun 2025	-

2	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	
	Proses Penyusunan APBDesa	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	
	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	
3	Proses Pengelolaan Aset Desa	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	

4	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	
5	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Sudah	Keterbatasan waktu dalam proses pelayanan sehingga menyiapkan *barcode* yang dapat discan untuk melakukan pengisian SKM.	

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sebanyak 49 orang mengisi SKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen di triwulan pertama 2026. Layanan Proses Pengoperasian Aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 13 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebume secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 95,44. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menunjukan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2026.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sistem, mekanisme, prosedur.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%).
- Tidak ada tidak lanjut yang belum terselesaikan.

Kebumen, 20 April 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kebumen

Drs BUDHI SUWANTO, M.Si

NIP. 197403251993021002

LAMPIRAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026

NILAI IKM	RESPONDEN			
95.44	Jumlah Responden	: 49 orang		
	Jenis Kelamin	: Laki-laki	= 29	orang
		: Perempuan	= 20	orang
	Pendidikan	: SD	= 0	orang
		: SMP	= 0	orang
		: SMA	= 11	orang
		: DIPLOMA	= 12	orang
		: S1	= 15	orang
		: S2/S3	= 7	orang
		: Lainnya	= 4	orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan
Pada Unit Penyelenggara Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Triwulan 1 Tahun 2026

No	Nama Layanan	Jumlah Responden	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan Masyarakat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	2	100	100	100	100	100	100	87.5	100	87.5	96.25
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	87.5	87.5	87.5	100	87.5	87.5	93.75	87.5	87.5	88.69
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	2	100	87.5	87.5	87.5	87.5	100	100	87.5	100	92.13
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	2	87.5	87.5	100	87.5	87.5	100	87.5	87.5	87.5	89.38
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	3	91.67	100	100	100	100	100	100	100	100	98.08
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	13	96.15	94.23	92.31	100	94.23	94.23	88.46	88.46	100	93.29
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	2	100	87.5	87.5	100	100	100	100	100	100	96.25
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	11	88.64	88.64	86.36	97.73	90.91	88.64	90.91	88.64	97.73	90
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
17	Pelayanan Musyawarah Desa	2	100	75	100	100	100	100	100	75	100	93.5
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99

No	Nama Layanan	Jumlah Responden	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan Masyarakat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jumlah		49	96.76	93.86	96.08	98.18	96.51	98.02	96.54	94.31	97.35	95.44

Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Layanan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	2	2
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	1	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	2	4
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	1	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	1	1
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	1	1	2
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	1	0	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	2	2
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	3	0	3
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	9	4	13
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	1	1	2
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	8	3	11
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	0	2
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	2	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	1	1	2
Total Responden		**29**	**20**	**49**

Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2026 Berdasarkan Usia

No	Nama Layanan	<=20	20-29	30-39	40-49	>=50	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	2	0	0	0	2
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	1	0	0	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	4	0	0	4
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	1	0	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	1	0	1
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	1	1	0	0	2
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	0	0	1	0	0	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	2	0	0	0	2
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	1	1	1	0	0	3
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	1	6	6	0	13
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	2	0	0	2
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	1	1	4	4	11
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	2	0	0	2
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	2	0	0	0	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	2	0	0	0	2
Total Responden		**1**	**13**	**19**	**11**	**4**	**49**

Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2026 Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama Layanan	PNS/TNI/POLRI	WIRAUSAHA/SWASTA	PETANI	PEDAGANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	Lainnya	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	2	0	0	0	0	0	2
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	1	0	0	0	0	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	0	0	0	0	2	4
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	1	0	0	0	0	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	0	0	1	1
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	0	0	0	0	2	2
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	1	0	0	0	0	0	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	1	0	0	0	1	2
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	2	0	0	0	0	1	3
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	5	0	0	0	0	8	13
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	2	0	0	0	0	0	2
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	4	3	0	0	0	4	11
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama Layanan	PNS/TNI/POLRI	WIRAUSAHA/SWASTA	PETANI	PEDAGANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	Lainnya	Jumlah
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	2	2
17	Pelayanan Musyawarah Desa	2	0	0	0	0	0	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	2	0	0	0	0	2
Total Responden		**22**	**6**	**0**	**0**	**0**	**21**	**49**

Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2026 Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Layanan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Lainnya	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0	2	0	0	0	2
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	0	0	1	0	0	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	1	0	1	0	2	4
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0	1	0	0	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	1	0	0	0	0	1
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	0	1	0	1	0	0	2
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	1	1	0	0	2
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	2	0	1	0	3
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	2	0	7	4	0	13
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	0	1	0	0	1	2
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	0	5	2	2	2	0	11
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	1	0	1	0	0	2
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	0	0	2	0	0	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0	2	0	0	0	2
Total Responden		**0**	**0**	**11**	**12**	**15**	**7**	**4**	**49**